

KAJIAN PERMUKIMAN KEMBALI PENDUDUK TEPIAN SUNGAI KAHAYAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Amiany ¹⁾

Nugraha Sagit Sahay ²⁾

ABSTRAK

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada hakekatnya disebabkan oleh penambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi serta perubahan dan perkembangan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh perubahan pola sosial budaya dan sosial ekonomi penduduk tersebut sebagai masyarakat kota. Pengadaan perumahan daerah perkotaan sangat terbatas sehingga masalah pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit dipecahkan, teruma bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu dalam pelaksanaannya sering kurang memperhatikan karakteristik atau latar belakang sosial-ekonomi masyarakatnya. Sehingga program-program diatas tidak selamanya bisa berhasil mulus, bahkan bias menemui kendala-kendala seperti mereka menolak untuk dipindahkan, atau mereka akan kembali lagi ke kawasan permukiman yang lama karena masyarakat tersebut kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, atau mereka kehilangan lapangan kerja.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya saat ini adalah mengembalikan tepian sungai Kahayan sebagai jalur hijau dan kawasan wisata kota. Salah satu nya adalah Kawasan Flamboyan Bawah yang pada awalnya adalah meruapakan jalur hijau namun dalam perjalanannya hingga kini menjadi permukiman yang tidak terencana..

Dari analisa yang dilakukan diketahui bahwa peluang usaha/kerja yang baru, sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat relokasi perlu diikuti dengan program-program lanjutan seperti pengadaan pelatihan dan peningkatan ketrampilan untuk memberikan kemampuan kewirausahaan atau kemampuan berwiraswasta dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.

Kata Kunci: *Permukiman Kembali, Tepian Sungai*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada hakekatnya disebabkan oleh penambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi serta perubahan dan perkembangan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh perubahan pola social budaya dan sosial ekonomi penduduk tersebut sebagai masyarakat kota (Sujarto). Sejalan dengan penambahan penduduk daerah perkotaan menurut Panudju (1999) mengakibatkan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan terutama kebutuhan perumahan. Salah satu permasalahan yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan adalah penyediaan akan kebutuhan perumahan. Padahal rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia selain pangan dan sandang.

Pengadaan perumahan daerah perkotaan sangat terbatas sehingga menurut Panudju (1999) masalah pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit dipecahkan, teruma bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di lain pihak kebutuhan perumahan di daerah perkotaan selalu meningkat dengan pesat. Akibatnya sebagian penduduk yang kurang mampu, mencari tempat tinggal pada kawasan yang tidak teratur, lingkungan kurang baik, kawasan slum, kawasan squater, atau pada kawasan marginal seperti pada bantaran sungai yang pada akhirnya muncul permukiman-permukiman liar dalam usaha mendapatkan tempat untuk berlindung yang dekat dengan tempat kerjanya.

¹⁾ Dosen Tetap Jurusan Arsitektur Universitas Palangka Raya

²⁾ Dosen Tetap Jurusan Teknik Sipil Universitas Palangka Raya

Budihardjo (1992) mengungkapkan bahwa dengan penduduk yang semakin bertambah terdapat ketidakseimbangan antara kota dan desa dengan pemusatan urbanisasi di kota-kota besar, maka masalah pembangunan penyediaan permukiman menjadi sangat mendesak. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman merupakan prakondisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab produktifitas manusia terutama sekali tergantung pada tersedianya wadah yang memadai untuk bekerja, beristirahat, berkumpulnya anggota keluarga dan interaksi masyarakat. Hal ini terkandung dalam GBHN 1993 bahwa pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan:

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup berkeluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga, dan harus mampu memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan, serta terbuat dari bahan dengan mengutamakan menggunakan bahan setempat.

Usaha pemerintah dalam penanganan masalah perumahan yaitu melalui program dengan penyediaan perumahan dan permukiman baik perkotaan dan perdesaan, program perbaikan perumahan, program penyehatan lingkungan perumahan, program penyediaan dan pengelolaan air bersih. Sedangkan pelaksanaan penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat golongan berpendapatan rendah antara lain pengadaan rumah baru oleh pemerintah dan swasta melalui peremajaan lingkungan perumahan dan relokasi permukiman yang dilakukan diatas kawasan lingkungan perumahan kumuh di daerah perkotaan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknik, kesehatan dan tata ruang. Akan tetapi kebijakan yang dilakukan itu tidak semuanya berjalan dengan baik apabila kebijaksanaan tersebut cara penanganannya tidak ada upaya-upaya peningkatkan fisik, kualitas lingkungan, atau peningkatan sosial-ekonomi masyarakat di lokasi yang baru.

Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957 dan sebagai kota terbesar di Kalimantan Tengah akan membawa konsekuensi menjadi tujuan bagi para migran yang berusaha untuk mencari peluang kerja, yang pada akhirnya juga membutuhkan tempat tinggal.. Salah satu permasalahan di Kota Palangka Raya yaitu permukiman yang berada pada Tepian Sungai Kahayan yang bisa menimbulkan pencemaran air sungai, disamping itu pula kawasan tersebut sangat rawan bencana banjir. Hal ini akibat ketidak mampuan masyarakat golongan berpendapatan rendah untuk membeli rumah, sebagai alternatifnya untuk mendapatkan tempat berlindung yang dekat dengan tempat kerja, mereka menempati kawasan-kawasan marginal seperti diatas.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya saat ini adalah mengembalikan tepian sungai Kahayan sebagai jalur hijau dan kawasan wisata kota. Salah satu nya adalah Kawasan Flamboyan Bawah yang pada awalnya adalah meruapakan jalur hijau namun dalam perjalanannya hingga kini menjadi permukiman yang tidak terencana. Perekembangan Kawasan Permukiman Flamboyan Bawah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya jalan penghubung kampung Pahandut dan Jl. A. Yani (Jl. Kalimantan dan Jl. Sulawesi), sejak adanya jalan tersebut maka tumbuhlah permukiman baru disepanjang Jl. Kalimantan dan Jl. Sulawesi yang kemudian menyebar memenuhi kawasan DAS Kahayan termasuk kawasan Flamboyan Bawah saat ini hampir seluruh masyarakatnya merupakan kelompok orang yang berpendapatan rendah / ekonomi rendah. Sebagai upaya mewujudkan permukiman yang layak maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.pada maka perlu dilihat dari respon masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Maka dari itu perlu adanya suatu kajian mengenai pengaruh permukiman kembali terhadap masyarakat yang menempati lokasi tersebut untuk menelaah pengaruh dari kebijaksanaan diatas memberikan dampak positif atau negatif pada masyarakat yang terkena permukiman kembali.

Konsep Permukiman Kembali

Permukiman kembali adalah suatu usaha untuk memindahkan penduduk dari suatu lokasi yang tidak layak lagi untuk permukiman karena alasan tertentu misalnya pada kawasan konservasi, kelayakan lahan, dengan mengadakan perbaikan-perbaikan tingkat hunian dan kesejahteraan penghuni.

Permukiman kembali akan menyebabkan berbagai dampak seperti hilangnya sumber-sumber produktif termasuk lahan, hilangnya pendapatan dan mata pencaharian dapat hilang, serta menurunnya kultur budaya dan kegotongroyongan yang ada dalam masyarakat. Apabila jika permukiman kembali tidak dapat dihindari, maka harus ada upaya-upaya bantuan dalam memulihkan kehidupan dan mata pencaharian bagi orang yang terkena dampak atau bahkan semakin meningkatkan mutu kehidupan mereka. Menurut Asian Development Bank (2002) langkah-langkah pencegahan dampak dari permukiman kembali adalah sebagai berikut pada tabel 1.

Tabel 1
Jenis Dampak Utama Permukiman Kembali

Jenis Dampak	Langkah Penanggulangan
<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan sumber yang produktif, termasuk lahan, pendapatan dan mata pencaharian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti rugi yang sesuai dengan harga penggantian atau penggantian bagi pendapatan dan mata pencaharian yang hilang. • Penggantian pendapatan dan biaya pemindahan selama waktu pembangunan kembali serta langkah pemulihan pendapatan bagi yang kehilangan mata pencaharian.
<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan perumahan, mungkin seluruh struktur, sistem dan fasilitas social masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti rugi bagi perumahan dan kekayaan yang hilang sesuai dengan harga penggantian, relokasi termasuk pembangunan tempat relokasi, kalau perlu serta langkah-langkah memperbaiki taraf hidup.
<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan kekayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti rugi sesuai harga penggantian atau diganti
<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan sumber daya masyarakat, lingkungan, peninggalan budaya dan harta lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Diganti atau ganti rugi sesuai dengan harga penggantian, langkah-langkah pemulihan

Sumber : Buku Panduan Tentang Permukiman Kembali, Asian Development Bank, 1999.

Menurut kebijakan ADB (2002), ditekankan bahwa penanganan bukan hanya ganti rugi dengan nilai penggantian guna mengembalikan kerugian harta kekayaan semata tetapi juga untuk langkah-langkah pemulihan taraf hidup dan mata pencarian, agar tidak mengalami kerugian akibat permukiman kembali. Bahkan kebijakan diatas mencakup mereka yang tidak harta kekayaannya seperti hak menyewa, petani bagi hasil, pekerja upahan, buruh tani, penghuni liar, penjual, penduduk suku terasing maupun kaum wanita tanpa hak legal sebagai orang yang berhak terhadap ganti rugi dan rehabilitasi. Selanjutnya diterangkan dampak yang mungkin terjadi pada orang terkena dampak tanpa hak atau kepemilikan legal atas tanah seperti pada tabel 2.

Tabel 2
Dampak Pada Orang Terkena Relokasi

Orang Terkena Dampak	Dampak
Petani penyewa/bagi hasil	Kehilangan kesempatan menyewa lahan dan hilangnya penghasilan dari lahan tersebut, tanaman. kehilangan tanaman dan sumber pengembangan tanaman
Pekerja tanpa lahan atau upahan	Kehilangan kesempatan bekerja dari lahan terkena dampak

Penduduk liar dan pedagang kecil	Kehilangan pekerjaan atau pendapatan dari relokasi
Penduduk suku terasing	Kehilangan hak adat terhadap lahan dan mata pencaharian
Kaum wanita dan wanita yang menjadi kepala rumah tangga	Kehilangan akses atas lahan atau harta kekayaan yang sah milik anggota keluarganya.

Sumber: Adapted from India: Handbook for Resettlement and Rehabilitation, The World Bank, 1994.

Proses permukiman kembali yang perlu dipertimbangkan adalah: pemilihan tempat relokasi, apabila relokasi yang dipilih jauh dari perkampungan asli dari tempat tinggal penduduk semula akan dapat menyebabkan tekanan, khususnya jika lokasi itu berbeda keadaan lingkungannya, pola kehidupan ekonomi, dan mata pencaharian atau parameter sosial dan budayanya. Sehingga relokasi ke kawasan yang jauh atau kawasan yang berbeda karakteristik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi harus sedapat mungkin dihindarkan.

Tahapan-tahapan dalam pemilihan lokasi untuk permukiman kembali berdasarkan buku penuntun dari ADB (2002) sebagai berikut:

1. Pemilihan lokasi dan alternatif

Pemilihan lokasi yang baik adalah unsur paling penting. Mulai dengan pilihan-pilihan alternatif, yang melibatkan pemukim kembali yang potensial dan penduduk setempat dalam proses tersebut

2. Studi kelayakan

Melakukan studi kelayakan lokasi alternatif dan mempertimbangkan potensi kawasan dari segi persamaan ekologi, harga lahan, pekerjaan, kemungkinan untuk memperoleh kredit, pemasaran dan peluang ekonomi lainnya untuk mata pencaharian penduduk terkena dampak dan masyarakat setempat.

3. Susunan dan rancangan

Susunan dan rancangan kawasan relokasi harus sesuai dengan spesifikasi dan kebiasaan budaya. Mengidentifikasi lokasi sekarang terhadap berbagai prasarana fisik dan sosial di masyarakat yang terkena dampak. Bagaimana anggota keluarga, kerabat, terkait satu sama lain di kawasan sekarang, serta berapa, sering dan siapa (jenis kelamin/umur) yang menggunakan berbagai sarana dan prasarana sosial. Penting memahami pola permukiman dan rancangan yang ada supaya dapat menaksir kebutuhan di kawasan permukiman yang baru. Masukan masyarakat harus menjadi bagian integral proses rancangan.

4. Pembangunan lokasi permukiman kembali

Luas lahan untuk pembangunan rumah harus berdasarkan tempat tinggal sebelumnya dan kebutuhan di kawasan baru. Masyarakat yang terkena permukiman kembali harus diijinkan membangun rumah mereka sendiri dari pada diberikan rumah yang sudah disediakan. Seluruh sarana dan prasarana fisik dan sosial harus sudah siap sebelum pemukim diminta untuk pindah ke lokasi. Organisasi orang terkena dampak dan perkumpulan masyarakat harus diajak bermusyawarah dalam pembangunan lokasi permukiman kembali.

Bentuk-bentuk relokasi dapat berupa rumah siap huni maupun kapling siap bangun: (1) Rumah siap huni, pembangunan rumah siap huni disini memerlukan lahan yang lebih luas dan harga tanah yang lebih murah permeter persegi. Sedangkan pada kenyataannya ketersediaan lahan di dalam kota itu sendiri sudah semakin mahal harganya. Dengan memperhatikan hal tersebut maka hampir tidak mungkin rumah siap huni tersebut dibangun di tengah kota, tetapi kemungkinannya dibangun pada kawasan pinggiran kota atau bahkan di luar kota. Sedangkan sarana yang diperlukan pada rumah siap huni antara lain berupa: sarana air minum/air bersih, sarana listrik, sarana pembuangan sampah dan jaringan jalan. (2). Kapling siap bangun, program kapling siap bangun sebagai salah satu upaya untuk relokasi, pertama kali diadakan untuk mengantisipasi proses perubahan status tanah yang tidak jelas.

Program kapling siap bangun ini memberi kesempatan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan dapat dilakukan kerja sama pemerintah ataupun lembaga swasta, sehingga pengadaannya tidak membutuhkan biaya yang besar. Dengan dibangunnya rumah oleh masyarakat sendiri maka partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lebih nyata, sedang pengadaan kapling siap bangun diharapkan program relokasi yang dilakukan bisa terealisasi.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan di atas maka tujuan penelitian di wilayah studi yaitu mengkaji permukiman kembali penduduk di Tepian Sungai Kahayan di lokasi permukiman Flamboyan Bawah terhadap peningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan diatas maka penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif dengan diskriptif korelasional. Dalam penelitian ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dalam bentuk data-data yang bisa di analisa dengan metode statistik yang kemudian ditunjang dengan kajian diskripsi.

Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian sangat dibutuhkan dalam membatasi penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi yaitu:

1. Ruang lingkup Lokasi

Batasan lokasi penelitian ini adalah meliputi kawasan permukiman kembali Flamboyan bawah di Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 83
Hasil Temuan Terhadap Kajian Tingkat Kesejahteraan
Sebelum Dan Sesudah Permukiman Kembali

Variabel Amatan		<i>Hasil Analisis</i>
Faktor Ekonomi	Mata Pencarian Utama	Tidak Ada Hubungan
	Mata Pencarian Sampingan	Tidak Ada Hubungan
	Anggota Keluarga Yang Bekerja	Tidak Ada Hubungan
	Peluang Usaha	Tidak Ada Hubungan
	Jarak Ke Tempat Kerja	Tidak Ada Hubungan
	Pendapatan Keluarga	Tidak Ada Hubungan
	Pengeluaran Keluarga	Tidak Ada Hubungan
	Kepemilikan Barang Sekunder	Tidak Ada Hubungan
Faktor Fisik	Kondisi Bangunan	Tidak Ada Hubungan
	Luas Bangunan	Sebelum < Setelah pemindahan
	Luas Tanah	Sebelum < Setelah pemindahan
	Status Kepemilikan	Sebelum < Setelah pemindahan
	Fungsi Rumah	Tidak Ada Hubungan
	Perbaikan Rumah	Tidak Ada Hubungan
	Pemakaian Air Bersih	Sebelum < Setelah pemindahan
	Pemakaian Listrik	Tidak Ada Hubungan
	Persampahan	Tidak Ada Hubungan
	Drainase	Sebelum < Setelah pemindahan
	Jaringan Jalan	Sebelum < Setelah pemindahan

Sumber : Hasil Analisis

Kesimpulan

Permukiman kembali di dalam penelitian ini pada hakekatnya mengkaji berdasarkan aspek kesejahteraan, walaupun kajian terhadap tingkat kesejahteraan seseorang dimungkinkan bisa berbeda dan sangat beragam, maka dalam penelitian ini tingkat kesejahteraan menggunakan tolok ukur yaitu pendapatan keluarga, peluang usaha, kepemilikan aset (kendaraan dan elektronika), keadaan fisik rumah, status kepemilikan, kondisi lingkungan, serta pelayanan utilitas yang ada di wilayah penelitian. Atas dasar tolok ukur tersebut, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum permukiman kembali belum dapat dipergunakan untuk mencerminkan tingkat pendapatan responden, karena pelaksanaan program permukiman kembali masih dalam waktu yang relatif pendek yaitu sekitar tiga tahun. Tingkat pendapatan responden sebelum dan setelah pemindahan rata-rata masih relatif rendah yaitu dibawah Rp. 300.000-, perbulannya. Responden yang mempunyai pekerjaan sampingan hanya 15%, sehingga dalam menambah pendapatan keluarga mereka melibatkan isteri dan anak-anak mereka yang sudah dewasa (dari 27 % meningkat menjadi 51%). Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dikarenakan sebagian besar mempunyai pekerjaan utama di sektor informal dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Secara umum tingkat pendidikan kepala keluarga sebagian besar relatif rendah yaitu pada tingkat SD (49%), dan yang tidak sekolah/tidak tamat SD (46%), selain itu pendidikan anak-anak mereka banyak yang tidak bisa sekolah dan putus sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan pada tingkat lebih rendah karena keterbatasan ekonomi mereka dalam membiayai sekolah anak-anak.
2. Permukiman kembali berdasarkan peluang kerja peluang usaha masih relatif rendah, karena belum bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini dikarenakan responden masih pada proses mengembalikan aset-aset mereka yang telah dipergunakan untuk investasi pembangunan rumah mereka. Disisi lain karena belum adanya program pelatihan ketrampilan, terbatasnya tingkat ketrampilan, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya modal yang mereka miliki dalam membuat usaha baru untuk menambah pendapatan. Peluang usaha hanya terjadi pada jumlah rumah yang mempunyai fungsi ganda yaitu sebelum pemindahan hanya sebesar 10% dan setelah pemindahan meningkat menjadi 17%, selain pemukiman kembali juga memberi pengaruh pada bertambahnya jarak ke tempat kerja yang semakin jauh.
3. Berdasarkan kepemilikan aset kekayaan (barang elektronika dan kendaraan) yang merupakan salah satu bentuk tabungan yang mereka lakukan secara umum belum sangat membantu dalam penyediaan modal untuk pembangunan fisik rumah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Kepemilikan barang elektronika dan kendaraan bagi masyarakat mempunyai sifat mobilitas yang relatif tinggi. Hal ini terlihat sebelum pemindahan masyarakat yang tidak memiliki mencapai 29%, sedang yang punya lebih dari satu (41%), tetapi setelah pemindahan menjadi hanya 17 %, dan yang punya lebih dari satu menjadi (39%). Kepemilikan kendaraan juga terjadi mobilitas yaitu sebelum pemindahan yang tidak punya kendaraan sebesar 54% dan setelah pemindahan mencapai 61% tetapi ada yang mampu mempunyai membeli mobil roda empat. Hal ini menunjukkan belum adanya kemampuan yang tinggi pada mereka untuk menabung dalam bentuk barang elektronika atau kendaraan.
4. Secara fisik telah menunjukkan peningkatan kesejahteraan, hal ini berdasarkan pada peningkatan kondisi fisik tempat tinggal masyarakat pada saat sebelum pemindahan bangunan permanen hanya 15%, dan setelah pemindahan bangunan permanen mencapai 93%. Begitu pula jika dikaji dari luas tanah/bangunan yang dimiliki juga terjadi peningkatan yaitu sebelum pemindahan luas tanah/bangunan yang dimiliki sebagian besar kurang dari 21 meter persegi (76%), dan setelah pemindahan semuanya mempunyai luas tanah/ bangunan diatas 45 meter persegi.
5. Terjadi peningkatan status kepemilikan tanah dan bangunan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman. Bangunan dan tanah di lokasi lama yang berstatus hak milik hanya 8%, walaupun tanah yang mereka beli secara hukum merupakan tanah milik pemerintah.

Setelah pemindahan status tanah dan bangunan semuanya telah menjadi hak milik masyarakat.

Tetapi peningkatan status belum menunjukkan kecenderungan yang relatif besar terhadap tingkat investasi yang dilakukan masyarakat karena terbatasnya kemampuan ekonomi keluarga.

6. Secara umum telah terlihat adanya peningkatan pada kondisi lingkungan di permukiman yang baru, karena adanya pembangunan drainase dan pembangunan jalan dengan kondisi yang baik, serta mempunyai aksesibilitas yang relatif tinggi. Hal ini di tunjang adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan terhadap prasarana yang dibangun oleh pemerintah.
7. Secara umum kondisi utilitas setelah pemindahan telah terjadi peningkatan terhadap pelayanan utilitas khususnya pelayanann air bersih (37% telah menggunakan PDAM), dan adanya pelayanan listrik dari PLN yang telah dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini perlu diungkapkan bahwa terdapat 8 responden yang tidak dapat diperoleh datanya karena beberapa kesulitan melakukan komunikasi di lapangan. Dari hasil penelitian maka dalam penanganan permukiman kembali yang perlu mendapat perhatian bukan hanya berupa pengganti kerugian harta kekayaan mereka maupun pembangunan fisik semata, tetapi diperlukan adanya langkah-langkah untuk memulihkan taraf hidup dan mata pencaharian agar tidak mengalami kerugian akibat permukiman kembali. Sebagai masukan terhadap penanganan permukiman kembali di kemudian hari agar bias berhasil dengan lebih baik maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) peluang usaha/kerja yang baru, sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Relokasi perlu diikuti dengan program-program lanjutan seperti pengadaan pelatihan dan peningkatan ketrampilan untuk memberikan kemampuan kewirausahaan atau kemampuan berwiraswasta dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
- b) Perlu adanya bantuan dana (baik dana bergulir atau pinjaman lunak) untuk memberikan modal dengan persyaratan yang relatif mudah. Karena selain pendapatan mereka relatif rendah, juga sebagian modal responden habis untuk biaya pembangunan rumah di lokasi yang baru.
- c) Pemberian dana bantuan pendidikan untuk anak-anak sekolah yang terkena dampak permukiman kembali sehingga tetap terjamin pendidikan anak-anak mereka misalnya lewat orang tua asuh, atau pemberian dana beasiswa. Sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk dana ke masyarakat secara langsung, tetapi melalui suatu lembaga seperti sekolah.
- d) Untuk memperkaya penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji dari aspek perikulu sosial, aspek interaksi terhadap permukiman lama, ataupun kajian terhadap penggunaan fasilitas bagi masyarakat di kawasan permukiman baru.
- e) Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan yang menyangkut bahwatanah yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh diperjual belikan ke orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 2002, *Buku Panduan Tentang Permukiman Kembali*, ADB, Manila Philip-pines
- Baker, David. 1980. *Memahami Kemiskinan di Kota, Prisma*, Nomor,6, Juni,.
- Brannen, Julia. 2002. *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiharjo, Eko. 1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Budiharjo, Eko. 1994. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Djemabut, Blaang. 1986, *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Daldjoeni, N. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni, Bandung.
- Heinz Frick. 1984. *Rumah Sederhana Kebijakan Perencanaan dan Kontruksi*, Konisius, Yogya-karta.
- Haryadi, Setiawan, B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Kerjasama Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Herlianto, M. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung, 1986
- Ibrahim, Jabal T. 2002. *Sosiologi Pedesaan*, UMM Pres, Malang.
- Juraidi. 2000. *Evaluasi Program Relokasi Penduduk Tepian Mahakam Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Telaah Positivistik, Raionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Alumni, Bandung.